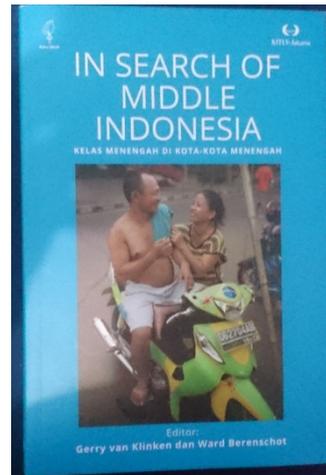


Resensi Buku

Van Klinken, Garry (ed). 2016. *In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah di Indonesia*. KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jumlah halaman: xiv + 318. ISBN 9879794619285

Buku ini berjudul asli *In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Towns*. Dieditori Garry Van Klinken dan Ward Berenschot dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Edisius Riyadi Terre, dengan judul *In Search Middle Indonesia; Kelas Menengah di Kota-kota Menengah*. Buku ini secara garis besar mencoba menjelaskan posisi dan perilaku kelas menengah di kota-kota Indonesia tingkat menengah, bukan kota metropolitan. Kota-kota tingkat menengah mungkin identik dengan ibukota provinsi dan kabupaten.

Kasus-kasus daerah yang diteliti dan kemudian laporannya dikumpulkan menjadi buku ini diantaranya, Pekalongan (Amalinda Savirani, *Penolakan terhadap Reformasi: Kekuatan Cengkeraman Patrimonialisme di Sektor Konstruksi di Pekalongan*), Cilegon (Nicolaas Warauw, *Meninjau Kembali Kelas Pekerja: Relasi Kelas di Kota-kota Menengah Indonesia*), Pontianak (Wenti Maruna Minza, *Etnisitas dan Cita-cita Orang Kerja di Pontianak*), Yogyakarta (Jan Newberry, *Kelas Mobil: Sirkulasi Anak-anak dalam Membangun Indonesia Menengah*), Kupang (Silvya Tidey, *Sebuah Kota yang Terbelah: Perkembangan dari Segmentasi Etnik Ke Berbasis Kelas di Kupang*), Timor Barat (Cornelis Lay, *Tumbuh Besar di Kupang*), Manado (Joseph Errington, *Mencari Bahasa Indonesia Menengah: Dinamika Bahasa di Sebuah Kota Menengah*); lalu, isu tentang komunitas Islam di kota (Noorhaidi Hasan, *Islam di Kota-kota Mengengah Indonesia: Kelas Menengah,*



Gaya Hidup, dan Demokratisasi), dan tuisan Ben White tentang sedikit perdebatan mengenai konsep diferensiasi dan relasi kelas, “Bertaruh pada yang tengah? Middletown, Mojokuto, dan Indonesia Menengah”.

Wilayah dan masyarakat perkotaan tingkat menengah, menurut buku ini, memiliki ciri-ciri: luasnya mungkin kurang dua puluh ribu hektare; jumlah penduduknya kurang dari satu juta orang, dengan tingkat urbanisasi, migrasi penduduk dari desa-desa ke kota-kota tingkat menengah ini dalam rangka mencari peluang dan kesempatan serta melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, mencapai 42%; urbanisasi yang cukup tinggi. Populasi kota tingkat menengah ini memperlihatkan 74% memiliki ponsel dan 81% memiliki sepeda motor. Ditambah lagi rumah tangga kelas menengah ini sebagian besar memiliki televisi, kulkas, serta dalam jumlah yang kecil mempunyai kendaraan (mobil) pribadi, terutama pemilikan mobil dipunyai oleh kelompok elite kota. Kelas menengah di kota tingkat menengah ini terdiri atas para wiraswastawan atau pengusaha menengah, pegawai swasta atau sektor publik, aparat birokrasi, guru, aparat militer dan kepolisian, dan para pemuda sekolah yang sebagian besar bercita-cita dan menginginkan posisi-posisi atau jabatan atau profesi seperti tersebut.

Pendidikan mereka cukup tinggi, antara tamatan Sekolah Lanjutan Atas dan Perguruan tinggi, yang dalam istilah umum disebut kaum terpelajar. Mungkin jumlah kelas menengah di kota-kota menengah ini sekitar 25 persen, yang dikelilingi oleh kelas bawah yang secara etnik dan agama saling bersilangan. Diperkirakan secara kasar, kota tingkat menengah ini ada sekitar 170 buah, tersebar di berbagai daerah di Nusantara.

Sebagian besar kelas menengah yang menghuni kota menengah ini jaringan hubungan mereka lebih bersifat lokal. Meskipun demikian, mereka dapat mengendalikan kota mereka sendiri, memainkan peran dalam mengontrol intervensi ekonomi, politik, dan kebudayaan dari orang-orang yang datang dari luar dan malah bisa menahan gempuran kepentingan dan kebijakan pemerintah pusat. Mungkin pada tingkat nasional mereka termasuk kelas menengah-bawah, tetapi di tingkat kota mereka dilihat sebagai kelompok "elite". Hubungan mereka dengan kelas bawah lebih banyak diikat oleh relasi primordial, seperti kesamaan agama dan etnik, serta ikatan patron-klien.

Inti yang aktif secara politik dari kelas menengah ini adalah birokrat, terutama dengan kroni-kroni bisnis mereka. Sumber kekayaan kelas menengah ini pada umumnya tidak mengontrol alat-alat produksi (kecuali para produsen batik di Pekalongan), tetapi mengendalikan rente yang mereka peroleh terutama dari sumber-sumber keuangan negara. Khususnya mereka yang memegang kekuasaan birokrasi menjadi sumbu pembagian rente negara dan seringkali pendistribusian sumber daya ekonomi itu didasarkan pada ikatan primordial serta hubungan patron-klien.

Relasi primordial dan patron-klien ini saling bertumpang tindih, karena hubungan bapak-anak buah atau *patron-client*

relationship terutama di daerah-daerah Luar Jawa kerap berdasarkan hubungan etnik, agama, kekerabatan, dan asal daerah yang sama. Hubungan primordial dan patron-klien yang ada di kota-kota menengah ini sangat terstratifikasi, mungkin lebih dari tiga lapisan, sehingga pembagian sumber daya ekonomi pun akan mengikuti lapisan sosial ini. Terutama dengan jumlah lapisan atau peringkat yang lebih dari tiga lapisan, maka otomatis rente yang mesti diperoleh kelompok elit di kota-kota menengah harus besar pula, di samping untuk dirinya, juga untuk dibagikan kepada kelompok primordial atau ke klien-klien mereka yang berlapis itu.

Tetapi untuk sementara relasi primordial dan patron-klien yang piramidal ini dapat meredam polarisasi kelas ekonomi, hanya ke dalam dua kelas. Namun tulisan Tidey mengenai Kota Kupang menunjukkan adanya potensi dan embrio polarisasi kelas, tetapi pembelahan ini banyak dipengaruhi asal etnik dan agama penduduknya. Dan mungkin agak umum, di Luar Jawa diferensiasi kelas seringkali diikuti oleh pembelahan etnik, serta kerap juga diferensiasi polarisasi kelas ini berganti. Pada periode tertentu kelompok etnik A yang berkuasa dan menentukan pembagian sumber daya ekonomi, pada periode lain kelompok etnik B, dan pada periode lain lagi kelompok etnik C. Proses perubahan diferensiasi kelas yang terjadi ini dipengaruhi oleh faktor kekuasaan politik, pada periode tertentu mungkin kelompok etnik A sedang berkuasa di pemerintahan, pada periode lain kelompok etnik B yang menguasai pemerintahan dan seterusnya. Menguasai pemerintahan berarti juga menguasai sumber rente dan kekuasaan atas rente inilah yang akan menentukan posisi kelompok etnik dalam diferensiasi kelas itu, apakah sedang berada di posisi atas atau sedang menduduki posisi di bawah. Di Luar Jawa penguasaan atas rente ini kerap kali bersirkulasi mengikuti garis etnik dan di Luar Jawa kelompok

etnik ini sangat beragam, biasanya lebih dari tiga kelompok etnik. Dan karena itu, terutama dalam rangka penguasaan atas rente ini, pemberlakuan otonomi daerah akan dipertahankan secara kuat, karena melalui penyelenggaraan otonomi daerah rente bisa diperoleh, diperbesar, didistribusikan, diperebutkan, dan bahkan mungkin dinegosiasikan. Otonomi daerah luas diterima di kota-kota tingkat menengah, karena, bukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tapi lebih diperuntukan bagi perolehan rente dari sumber-sumber keuangan negara.

Para penulis di dalam buku ini hampir sebagian besar menggambarkan, bahwa perekonomian di kota tingkat menengah ini lebih bersifat informal. Tetapi informalitasnya bukan dalam pengertian umpamanya bekerja dengan menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima) atau bergerak di sektor ekonomi bawah lainnya yang tidak terdaftar resmi di pemerintahan, dan memang separuh dari semua pekerja di perkotaan menengah bekerja di sektor informal. Banyak usaha ekonomi formal, terutama yang dibiayai oleh negara, yang cara produksi dan transaksinya diatur secara informal, di luar aturan resmi (hukum) dan malah ilegal. Informalitas perekonomian dengan sengaja dimunculkan oleh kelompok elite kota, karena dengan cara transaksi di bawah tangan, mereka bisa memperoleh rente yang besar, terutama transaksi dari berasal dari proyek-proyek dan program negara.

Informalitas dalam perekonomian adalah matriks penting bagi kekuasaan elite kota menengah kota ini. Mengapa para elit kota menengah ini memainkan proses ekonomi secara informal? Seperti dikatakan di atas, dengan pengaturan ekonomi secara informal mereka bisa memperoleh rente yang besar dari menyedot sumber keuangan negara. Terutama sejak reformasi, pembangunan prasarana dan sarana ekonomi, program-program sosial, pendidikan, dan kebudayaan banyak

dibiayai oleh Negara. Jumlah ini lebih dari setengah pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat. Pembiayaan pembangunan yang besar dari keuangan Negara itu dimainkan dengan cara informal, dengan membagi-bagikan proyek dan melakukan *mark-up*. Rente ekonomi dapat diperoleh dengan sangat besar. Dengan rente itu mereka bisa mempertahankan posisinya sebagai elite, dan dengan perolehan rente itu mereka membagi-bagikan kepada para klien dan pengikut barisan primordialnya. Dengan cara seperti ini kelompok elite kelas menengah kota memperoleh dukungan dan kuat lemahnya dukungan dari kelompok patron-klien dan primordialnya tergantung pada besar kecilnya pemberian sebagian rente itu.

Dan ada yang menarik temuan dari buku ini. Sebenarnya, Indek Gini tentang ketidak-setaraan agak rendah di kota-kota menengah yang didominasi oleh ekonomi informal. Ada kampung kumuh yang tidak terlalu menyedihkan, villa orang kaya yang tidak mencolok, dan segregasi spasial yang kurang jelas. Sejauh kota-kota menengah di Indonesia didominasi oleh kelas menengah yang bertumpu pada informalitas ekonomi yang luas, "tidak terlalu terpolarisasi" hanya ke dalam dua kelas. Perbedaan sosial yang paling mencolok di kota-kota menengah lebih berdimensi etnik dan agama dan secara sosial-ekonomi berlapis-lapis. Nah, seperti telah diulas tadi, polarisasi kelas belum terjadi di kota-kota menengah ini, karena terhambat oleh hubungan primordial dan patron-klien yang sangat berperingkat dan kekuasaan di dalam institusi kemasyarakatan dan pemerintahan bersirkulasi, berganti-ganti secara etnik dan agama. Diferensiasi kelas terutama di Luar Jawa tidak ada yang final, apalagi abadi, tetapi selalu berputar. Kelompok etnik atau agama siapa yang pada periode tertentu menguasai pemerintahan, pada periode berikutnya mungkin jatuh. Dengan demikian, diferensiasi kelas yang berganti-

ganti dalam penguasaan politik pemerintahan untuk sementara bisa menahan polarisasi kelas.

Rezim neo-patrimonialisme di kota-kota menengah ini telah terbentuk sejak lama. Kebanyakan institusi pemerintah daerah dan pasar “melekat secara sosial” dalam jejaring patron-klien. Ini menghasilkan jenis bisnis dan politik khas di kota-kota menengah yang dikenal – klientalistik dan anti-liberal alias ekonomi informal, yang berada di bawah kendali dan aturan main kelompok elit kota. Masyarakat kota-kota menengah didominasi bukan oleh warga negara yang bebas berbicara kebenaran dan keadilan, melainkan aktor-aktor kolusif yang terikat jaringan patron-klien dan primordial, seperti blok-blok birokrasi, legislator, pengusaha, aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan wartawan.

Hampir setiap kaum terpelajar dan mahasiswa pribumi di kota-kota menengah ingin jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka bukan terpesona oleh pekerjaan itu karena dapat memberikan penghasilan yang tetap dan mereka pun dapat memperbesarnya lewat rente. Setiap kontraktor bangunan mengandalkan pada pengadaan dari negara. Politik di mana para anggota dari kelas menengah perkotaan terlibat bukanlah tentang mengurangi kekuasaan negara, melainkan untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya ekonomi negara. Juga bukanlah tentang memberikan pasar ruang untuk bernapas, tetapi tentang meningkatkan kekuasaan negara untuk mendistribusikan keuntungan pasar kepada para pemain-pemain non-pasar. Pemerintah pusat hampir tidak mampu melakukan pengendalian, malah banyak memenuhi tuntutan para bos (kelompok elite) daerah. Kekuatan tersembunyi dari kelas menengah ini justru terletak pada kemampuan mereka untuk mengaburkan perkonomian formal menjadi informal, dengan membuat aturan-aturan yang kompleks dan rumit, barantai, dan

memakan waktu, birokratisme. Karena dengan cara itu kelompok lain sulit untuk menembusnya, kekuasaan dapat dipertahankan; rente ekonomi untuk sementara tidak jatuh sepenuhnya pada kelompok lain.

Ketidakpercayaan terhadap modal besar lebih kuat tertanam di antara pengusaha-pengusaha kota ini. Bersama birokrat, mereka memiliki kepentingan bersama untuk menjaga agar orang luar tidak dapat masuk. Ini dikarenakan anggapan akan mengganggu pendapatan, dari proyek-proyek pemerintah, serta pendistribusian rente. Para birokrat dan sekutu mereka meningkatkan rente dengan melemahkan lembaga dan peraturan, terutama dari pemerintah pusat dan yang berasal dari penguasa sebelumnya. Lalu, mereka yang sedang berkuasa bersama sekutu dan aliansinya, membuat lembaga dan aturan-aturan yang baru pemerintahan yang akan menguntungkan mereka. Dengan demikian rente ini diperoleh melalui proses politik, dengan membangun aliansi politik, bukan atas dasar mutu layanan dan pasar yang tidak terdistorsi.

Hal yang menarik, kelas menengah ini mempraktekkan demokrasi, dengan syarat berjalan seiring dengan otonomi daerah. Demokrasi telah menawarkan elite lokal kesempatan ekonomi dan politik yang lebih besar yang tidak akan mereka peroleh di bawah rezim yang terpusat. Bagi mereka mempraktekkan demokrasi adalah suatu keharusan, tapi persyaratannya harus berbanding lurus dengan otonomi daerah. Ini juga kenapa demokrasi dan otonomi begitu mudah diterima, karena lewat kedua hal itu mereka (kelompok elite kota) akan memiliki kesempatan untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga rente tetap dapat diperoleh. Tetapi di kota-kota menengah di Luar Jawa tidak ada pemegang kekuasaan (kelompok elite) yang langgeng, selalu berputar.

Buku ini sangat menarik. Meskipun ada sepuluh topik berbeda yang dibahas, kesemua topik membahas soal mempertahankan kekuasaan ekonomi dan politik dalam pemerintahan dalam rangka untuk memperoleh rente ekonomi dari sumber keuangan negara. Lewat buku secara konseptual kita akan mendapatkan pengetahuan mengenai polarisasi kelas

yang formatif di kota-kota tingkat menengah yang terpotong dan tertahan oleh ikatan-ikatan primordial dan patron-klien, terutama di wilayah Luar Jawa.

Budi Rajab

Staf Pengajar Departemen Antropologi,
FISIP-Universitas Padjadajaran.